



Model Perumusan Kebijakan Pendidikan

Mulyadi¹, Eling Retno Kholifah², Suryadi³, Sutriyanti⁴, Hermanto⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: kholifaheling@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2024-01-15 Published: 2024-02-01 Keywords: Models; Policy; Education.	The policy formulation model is knowledge that should be mastered by every individual, because every individual must have the opportunity to make policies. What model will be used in different situations. So the researchers discussed the education policy formulation model using research that is a literacy study, by collecting as many articles, books and scientific papers as possible related to the policy formulation model. The result of this research is that the education policy formulation model is divided into seven models, namely the institutional model, system model, rational model, incrementalist model, mixed inquiry model, process model, and elite theory model. From the explanation related to the policy formulation model, it can be concluded that each model must have its own weaknesses and advantages, just look at the situation and conditions at the time of policy formulation, which model is suitable for use in that situation. There are several things that become a measure in model selection, including urgency related to the interest that the policy must be ratified quickly, then related to the use of policies over a long period of time which requires the focus of policy formulation to be used in a sustainable situation, and the last is related to cost and time efficiency.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2024-01-15 Dipublikasi: 2024-02-01 Kata kunci: Model; Kebijakan; Pendidikan.	Abstrak Model perumusan kebijakan merupakan pengetahuan yang seharusnya dikuasai bagi setiap individu, karena setiap individu pasti memiliki kesempatan dalam membuat kebijakan. Model apa yang akan digunakan dalam situasi yang berbeda. Maka peneliti membahas terkait model perumusan kebijakan pendidikan menggunakan penelitian yang bersifat studi literasi, dengan mengumpulkan artikel, buku serta karya tulis ilmiah sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan model perumusan kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah model perumusan kebijakan pendidikan di bagi menjadi tujuh model, yakni model kelembagaan, model sistem, model rasional, model inkrementalis, model penyelidikan campuran, model proses, dan model teori elit. Dari pemaparan terkait model perumusan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa setiap model pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, tinggal melihat situasi dan kondisi pada saat perumusan kebijakan, model mana yang cocok digunakan dalam situasi tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi ukuran dalam pemilihan model, diantaranya yakni <i>urgensi</i> berkaitan dengan kepentingan agar kebijakan tersebut harus cepat disahkan, kemudian berkaitan dengan penggunaan kebijakan dalam jangka waktu yang lama yang mengharuskan fokus perumusan kebijakan dapat digunakan pada situasi yang berkelanjutan, dan yang terakhir berkaitan dengan biaya dan keefisienan waktu.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aktivitas yang sangat kompleks. Setiap manusia hampir seluruhnya memiliki keterlibatan dalam dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur politik, hukum, ekonomi, kesehatan, budaya, psikologis, social bahkan agama semua masuk dalam proses pendidikan. Bagaimanapun proses pendidikan yang dijalani harus senantiasa memperhitungkan serta mempertimbangkan unsur-unsur tersebut agar strategi dan kebijakan yang dilakukan benar-benar sampai pada tujuan yang telah ditetapkan dan dicita-citakan.

Pendidikan harus menjadi salah satu hal yang dianggap sebagai kebutuhan yang penting untuk kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu mutu pendidikan harus menjadi hal yang harus diperhatikan dan pendidikan juga harus berjalan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan karena akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan dengan cepat dan tepat. Dalam meningkatkan mutu pendidikan pasti ada beberapa aturan dan kebijakan yang dibentuk karena proses peningkatan mutu pendidikan bukanlah sesuatu yang instan, dibutuhkan yang namanya analisis terkait hal-hal yang akan

ditingkatkan, serta analisis kebijakan apa yang sesuai dengan kondisi atau tujuan terkait.

Mengapa kebijakan dibutuhkan dalam proses peningkatan mutu pendidikan? karena kebijakan merupakan pedoman atau pegangan untuk mencapai kesepakatan. Berbagai ahli mengutarakan pendapat mengenai makna dari kebijakan. Namun secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kesimpulan atau ringkasan keputusan pemerintah yang menjadi acuan tingkah laku guna memecahkan masalah atau persoalan dan di dalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilakukan (Madjid, 2018).

Dalam hal ini perumusan kebijakan pendidikan haruslah tepat serta rencana dan program yang akan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Model serta pendekatan dalam perumusan kebijakan harus tepat, karena seiring perkembangan zaman model dan pendekatan dalam perumusan kebijakan juga ikut berkembang. Maka, penulis melakukan penelitian dengan membahas tentang model perumusan kebijakan pendidikan. Hal ini dianggap penting karena pemahaman mengenai model dalam perumusan kebijakan pendidikan harus dikuasai oleh setiap individu, lembaga, maupun stakeholder kebijakan itu sendiri. Dampak negatif dari kurangnya penguasaan teori mengenai model perumusan kebijakan akan menimbulkan masalah secara terus-menerus, karena kebijakan berhubungan dengan lingkup luas. Contohnya jika pemerintah tidak menguasai betul mengenai model apa yang harus digunakan dalam perumusan kebijakan sesuai dengan situasi yang dihadapi, maka beberapa kebijakan yang telah dirancang dengan matang akan menghadapi penolakan dari masyarakat maupun stakeholder terkait.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur (*library research*). Metode *library research* merupakan metode penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian studi lapangan, perbedaan anatar keduanya dalam pengumpulan data, dalam metode analisis literatur pengumpulan sumber data diambil dari berbagai buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa karya ilmiah seperti buku, dan artikel ilmiah yang membahas tentang analisis kebijakan pendidikan dan model-model dalam perumusan kebijakan.

Fokus penelitian membahas tentang model perumusan kebijakan pendidikan secara mendalam. Tujuan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait model yang diambil dalam pembuatan kebijakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi serta tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan study literatur yang dilakukan ada Sembilan model perumusan kebijakan yang dijadikan dalam penetapan kebijakan, masing-masing ahli dan penulis dalam karya ilmiah yang dianalisis memiliki pemahaman yang berbeda terkait model perumusan kebijakan, dan dari situlah peneliti membandingkan terkait penjelasan masing-masing ahli kemudian peneliti memberikan intisari dari penjelasan tersebut. Dalam penelitian ini juga memberikan contoh kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan model-model perumusan kebijakan dalam lingkup pendidikan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni data yang telah ditemukan kemudian dianalisis secara sistematis untuk memberikan hasil secara jelas kepada pembaca agar mudah dalam proses pemahamannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model perumusan kebijakan merupakan proses pengambilan tindakan dan keputusan dari berbagai alternative pilihan, biasanya dalam prosesnya mempertimbangkan beberapa keuntungan dan kerugian dan keefisienan dalam penentuan suatu kebijakan umum maupun dalam lingkup pendidikan (Anggara, 2014).

William N. Dunn yang merupakan ilmuan politik mengemukakan bahwa model perumusan kebijakan dibagi menjadi Sembilan model, yakni model deskriptif, model normative, model verbal, model teori elit, model teori rasionalisme, model inkrementalis, model pengamatan, model demokratis, dan model strategis (Arwildayanto, 2018). Selanjutnya Asep Abdul Aziz dalam temuannya memaparkan bahwa model perumusan kebijakan pendidikan dibagi menjadi sebelas model, diantaranya yakni model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan campuran, model proses, model teori elit, model rasional, model inkrementalis, model strategis, model deliberative, model analisis kebijakan pendidikan, dan model pendekatan implementasi kebijakan public (Aziz, 2020). Henni Marsari dalam temuannya juga memaparkan bahwa ada Sembilan model perumusan kebijakan, yakni model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan campuran, model proses, model teori elit, model rasional, model inkrementalis,

model analisis kebijakan pendidikan, model pendekatan implementasi kebijakan public (Marsari & Hairani, 2021). Dari beberapa model yang telah dipaparkan yang diambil dari beberapa temuan, maka penulis akan membandingkan pengertian masing-masing model menurut para ahli.

Model kelembagaan merupakan model yang bersifat tradisional dimana fokus pembuatan kebijakan ini hanya di fokuskan kepada lembaga pemerintah. Menurut William N. Dunn model kelembagaan adalah model yang digunakan dalam perumusan kebijakan adalah tugas dari pemerintah. Dalam hal ini ada tiga lembaga internal pemerintah yang menjadi aktor dalam perumusan kebijakan, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif (Arwildayanto, 2018). Dalam arti kelembagaan sendiri seringkali diakaitkan dengan organisasi, padahal antara keduanya punya makna yang berbeda, yakni kelembagaan merupakan kelompok dari peran (*cluster of role*) sedangkan organisasi merupakan bagian pengambilan keputusan dan tindakan (Wibowo, 2013).

Menurut Asep Abdul Aziz dalam temuannya memaparkan bahwa model perumusan kebijakan kelembagaan merupakan perumusan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut Dye ada tiga ciri utama lembaga dalam memberikan kebijakan yaitu pengesahan yang diberikan oleh lembaga negara, kebijakan-kebijakan negara dapat disebarluaskan karena kebijakan pemerintah bersifat universal, dan hanya pemerintah yang memegang hak dalam pembuatan kebijakan dan masyarakat harus setuju dengan kebijakan yang telah di sahkan (Azizi & Nurfarida, 2020). Henni Marsari dalam tulisannya menjelaskan bahwa model kelembagaan berprinsip bahwa penanggung jawab pembuatan kebijakan adalah pemerintah. Semua hasil kebijakan yang telah dibentuk akan menjadi kebijakan public, yang harus ditaati. Dalam temuannya juga dijelaskan bahwa model kelembagaan ini memiliki keunggulan yakni masyarakat dapat diayomi oleh pemerintah melalui pembentukan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan kekuasaan yang sah pula, sedangkan kelemahan dalam model ini yakni tidak ada perhatian terkait hubungan anatara institusi dan konsep dari kebijakan itu sendiri (Marsari & Hairani, 2021).

Dari beberapa pemaparan terkait model kelembagaan di atas penulis merumuskan bahwa, model kelembagaan merupakan model yang dilakukan dalam proses perancangan

hingga pembentukan kebijakan murni dilakukan oleh pemerintah tanpa campur tangan individu atau kelompok *non* pemerintah. Dalam hal ini pembentukan kebijakan pendidikan yang melalui model kelembagaan, seperti penetapan kebijakan *full day school* yang mana penetapan kebijakan ini tidak melibatkan masyarakat dan *stakeholder* pendidikan itu sendiri, karena semata-mata hanya untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menghadapi kemajuan zaman. Melihat hal ini dampak negative yang terjadi, yakni terhapusnya sekolah diniyyah yang biasanya dilakukan pada siang atau sore hari dikarenakan siswa melaksanakan pembelajaran di sekolah secara penuh (Setyawan, 2021).

Paine dan Naumes merupakan ahli yang mengembangkan model sistem dalam perumusan kebijakan, ahli ini mengatakan bahwa model sistem merupakan model yang bersifat deskriptif yakni menjelaskan hal yang terjadi dan situasi yang di hadapi secara nyata pada proses penyusunan kebijakan (Marsari & Hairani, 2021). Sedangkan menurut William N. Dunn tokoh ini tidak menggunakan kalimat sistem dalam model perumusan kebijakan, tokoh ini secara langsung menggunakan kalimat model deskriptif dengan tujuan penggunaan model ini untuk memberikan penjelasan dan prediksi antara sebab dan akibat dari pilihan kebijakan baik dalam bidang pendidikan maupun di bidang lainnya (Arwildayanto, 2018).

Menurut Alan J. Hahn dalam temuannya mengemukakan bahwa model sistem merupakan model perumusan kebijakan dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pembuatan kebijakan, karena pada model ini bertujuan untuk membantu mengurangi kecenderungan pemikiran publik terkait pemerintah merupakan lembaga independen yang menetapkan kebijakan tanpa adanya persetujuan dari masyarakat sekitar. Maka, model sistem merupakan model kebijakan yang cocok untuk para pendidik, karena kembali lagi kepada pengertian pendidikan yang merupakan usaha bersama yang dilakukan bersama yakni melaksanakan pembelajaran bersama demi mencapai tujuan bersama. Kebijakan pendidikan sebaiknya menggunakan model ini karena besar kemungkinan kebijakan yang dibuat akan dipahami secara langsung oleh *stakeholder* sehingga kebijakan dapat ditaati dan dilakukan sampai tujuan pembuatan kebijakan tersebut dapat tercapai secara tepat dan optimal (Hahn, 1987).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa model sistem adalah model

perumusan kebijakan yang proses pembuatannya mengikutsertakan masyarakat dan juga *stakeholder* kebijakan itu sendiri bersama pemerintah. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Masyarakat dimintai pendapat dan aspirasi terkait kebijakan yang akan dibuat, dan inilah salah satu kelebihan model ini yakni memiliki sikap demokratis. Sedangkan kelemahan dalam model ini adalah keefisienan dalam proses perumusan kebijakan, seperti banyak memakan waktu karena prosesnya cukup panjang dalam penetapan kebijakan.

Dalam hal ini juga telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 bab dua pasal dua, yakni masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan dalam suatu daerah harus melibatkan masyarakat sesuai dengan penjelasan terkait model sistem dalam penetapan kebijakan.

Model rasional merupakan model yang mengutarakan pendapat bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain* yang berarti pemerintah sebagai perancang kebijakan harus menetapkan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Asep Abdul Azizi dalam temuannya mengemukakan bahwa model rasional merupakan model perumusan kebijakan yang akan menghasilkan kebijakan yang paling efisien karena model rasional berakar dari teori-teori pemikiran positifisme dan rasionalisme yang berusaha untuk meningkatkan kondisi hidup manusia (Aziz, 2020). Henni Marsari dalam temuannya memaparkan kelebihan pada model rasional yaitu kebijakan yang ditetapkan akan sesuai dengan kondisi lapangan namun pada model ini juga terdapat kelemahan yakni keterbatasan rasionalitas manusia dan pembuat kebijakan itu sendiri (Marsari & Hairani, 2021). Namun, Howlett mengemukakan bahwa kebijakan rasionalis model siklus ini adalah mengabaikan politik yang kompleks lingkungan di mana pengambilan kebijakan berlangsung. Kritik ini, berkaitan erat dengan asumsi rasionalitas, menyoroti kurangnya akurasi dalam mendefinisikan proses pembuatan kebijakan yang terdiri dari proses-proses yang terpisah dan pada tahapan yang berbeda (Howlett, Ramesh, & Perl, 2009).

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa model rasional dalam perumusan kebijakan

merupakan model yang tepat dalam pembuatan kebijakan, karena bersifat rasional dan menurut logika dalam pembuatannya, namun kelemahan dalam model ini adalah keterbatasan waktu serta pemikiran pembuat kebijakan yang harusnya sesuai dengan lingkungan sekitar, namun lebih mengemukakan pendapat menurut rasional

Model inkrementalis merevisi asumsi model rasional, dengan alasan bahwa pengambilan keputusan bukanlah proses yang sepenuhnya rasional. Sebaliknya, pilihannya hanya terbatas dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, dan pengambil keputusan mengorbankan tujuan kebijakan mencapai hasil yang layak secara politik, yang dihasilkan dalam perubahan bertahap (Lindblom, 1959). Model inkrementalis tetap didukung oleh asumsi bahwa solusi kebijakan dikembangkan respons terhadap masalah yang teridentifikasi, tetapi hal itu menimbulkan gagasan rasionalitas terbatas. Model inkrementalis merupakan model perumusan kebijakan yang tidak menggunakan atau tidak melewati proses karena model inkrementalis merupakan proses perumusan kebijakan dengan memodifikasi kebijakan sebelumnya, model ini digunakan ketika terdapat kesalahan atau masalah pada kebijakan yang ditetapkan sebelumnya (Marsari & Hairani, 2021). Dapat disimpulkan bahwa model inkrementalis merupakan model yang digunakan hanya pada waktu tertentu, tidak dapat digunakan dalam masa yang berkelanjutan, karena sifatnya memperbaiki atau memodifikasi kebijakan yang ditetapkan sebelumnya, dalam perumusannya juga tidak menggunakan proses yang bertahap. Kebijakan ini kurang optimal jika digunakan dalam perumusan kebijakan pendidikan, karena kebijakan pendidikan umumnya dirumuskan untuk jangka waktu yang panjang, namun jika permasalahan kecil model inkrementalis bisa digunakan karena tidak memberikan banyak efek yang besar.

Dari pemaparan terkait model rasional dan inkrementalis di atas, dapat dilihat bahwa setiap model memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Maka Amitai Etzioni seorang tokoh sosiologi mencoba merancang model baru dalam perumusan kebijakan, yakni *mixed scanning* yakni model penyelidikan campuran yang merupakan model dalam perumusan kebijakan dengan melihat dua sudut pandang dalam penetapan kebijakan, dengan menyatukan dua model pada model ini mengharuskan menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan teori inkrementalisme dengan

merumuskan kebijakan dengan melihat dan memahami situasi dan kondisi yang berbeda (Mulyana, 2019). Dapat disimpulkan bahwa model penyelidikan campuran merupakan model perumusan kebijakan dengan menggabungkan dua model yakni model rasional dan inkrimental, karena penemu model ini setuju terkait pemahaman dua model tersebut, namun menemukan beberapa kelemahan dari kedua model itu. Model ini merupakan model yang efektif dalam perumusan kebijakan karena dalam perumusannya melihat situasi dari dua sudut pandang yang berbeda yakni sudut pandang yang luas dan sempit.

Model proses mencoba untuk dapat meng-generalisasi tentang urutan langkah atau tindakan yang terjadi ketika isu kebijakan diangkat, diperdebatkan dan diselesaikan. Mereka lebih fokus pada apa yang terjadi, kapan dan bagaimana, lalu siapa partisipannya, dan mengapa hasil tertentu terjadi. Contoh tipikal mencakup tahapan identifikasi masalah, perumusan proposal, legitimasi program, penganggaran program, pelaksanaan program, evaluasi program dan masalah resolusi/penghentian program. Model proses sangat luas digunakan dalam pendidikan kebijakan. Mereka membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jelas-jelas mendesak seperti, "Di mana kita mulai?" dan "Apa yang terjadi selanjutnya?" (Jones, 1984).

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa model proses merupakan model perumusan kebijakan yang teroganisir, karena terdapat langkah-langkah atau proses tertulis dalam pembuatannya, yakni dimulai dari identifikasi masalah, penyusunan program, perumusan rancangan kebijakan, persetujuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Dye, 2011). Model ini beranggapan bahwa masyarakat terdiri dari dua pemegang kekuasaan yakni penguasa/elit dan yang bukan pemegang kekuasaan disebut massa. Model ini dominan mempertimbangkan kepentingan pemegang kekuasaan dibanding kepentingan masyarakat atau *stakeholder* itu sendiri (Marsari & Hairani, 2021).

Jelasnya, model teori elit beranggapan bahwa perumusan kebijakan hanya ditentukan oleh para kelompok elit, sehingga kebijakan public bersifat *top-down* yakni dari atas dan diikuti oleh masyarakat bawah, yaitu dari kelompok elit kepada kelompok massa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemahaman mengenai model perumusan kebijakan merupakan hal yang seharusnya dikuasai bagi individu, karena setiap orang pasti mempunyai kesempatan membuat kebijakan di dalam hidupnya, baik kebijakan yang bersifat macro ataupun kebijakan yang bersifat micro. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model-model perumusan kebijakan memiliki pemahaman masing-masing dalam prosesnya, yakni:

1. Model Kelembagaan

Model kelembagaan merupakan model yang disusun oleh lembaga pemerintah. Model ini bersifat tradisional karena dalam perumusan kebijakan tidak mengikutsertakan masyarakat atau stakeholder kebijakan itu sendiri.

2. Model Sistem

Model sistem merupakan model yang berbeda dari model kelembagaan karena dalam perumusan kebijakan, model ini merangkul masyarakat, stakeholder kebijakan, serta pemerintah dalam perumusan kebijakan, dengan melihat situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.

3. Model Rasional

Model rasional merupakan model perumusan kebijakan yang didasari oleh teori positifisme dan rasionalisme yakni perumusan kebijakan dengan cara mengumpulkan data-data yang valid kemudian di analisis, model ini menggunakan rasional dalam perumusan kebijakannya sesuai dengan masalah kebijakan yang dihadapi.

4. Model Inkrimentalis

Model inkrimentalis merupakan model perumusan kebijakan dengan menganalisis kembali kekurangan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Model kebijakan ini menawarkan model yang praktis karena hanya fokus kepada perbaikan ataupun pengembangan yang sudah ada, tidak membuat kebijakan baru dengan jangka waktu yang panjang.

5. Model Penyelidikan Campuran

Model ini merupakan model yang menggabungkan antara model rasional dan inkrimentalis, model ini cocok digunakan dalam lingkup perumusan kebijakan yang luas dan kebijakan yang mencakup segala bidang, karena pada perumusan kebijakan dengan model ini melihat dari berbagai sisi

baik itu yang bersifat rasional maupun inkrementalis.

6. Model Proses

Model proses merupakan model perumusan kebijakan yang bersifat tertata karena dimulai dari proses identifikasi masalah, penyusunan program, perumusan rancangan kebijakan, persetujuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kelemahan pada model ini adalah cukup memakan waktu yang banyak dalam proses perumusan kebijakannya.

7. Model Teori Elit

Model teori elit merupakan model perumusan kebijakan yang dibentuk langsung oleh para kelompok elit termasuk ahli kebijakan, dan kelompok massa seperti masyarakat biasa hanya bisa menerima dan menjalankan kebijakan sesuai yang telah di sahkan

B. Saran

Pembahasan mengenai model perumusan kebijakan yang disajikan penulis belum sempurna dan sangat terbatas serta masih membutuhkan masukan dan saran. Saran untuk penulis yakni lebih memperbanyak literasi terkait model perumusan kebijakan pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arwildayanto. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: CV. Cendekia Press.

Aziz, A. A. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 193-201.

Azizi, A. A., & Nurfarida, R. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 193-201.

Dye, T. R. (2011). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.

Hahn, A. J. (1987). Policy Making Models and Their Role in Policy Education. *Agricultural and Food Policy*, 222-235.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy, Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.

Jones, C. O. (1984). *An introduction to the study of public policy*. Monterrey: Brooks/Cole.

Lindblom, C. E. (1959). The Science of Muddling Through. *Associate Of Professor Economics*, 78-88.

Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Marsari, H., & Hairani, S. (2021). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 89-94.

Mulyana, Y. (2019). Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 490-511.

Setyawan, F. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Full Day School di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 369-376.

Wibowo, L. R. (2013). Analisis Kebijakan Publik Pengembangan Model Kelembagaan Kompensasi DAS Ciliwung. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 253-366.